

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menitikberatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten, termasuk pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Penyediaan rujukan mengenai proses perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dalam bentuk suatu buku pedoman diperlukan untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan perencanaan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Buku pedoman ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RTRW Kabupaten.

1.3 RUANG LINGKUP PEDOMAN

Pedoman ini meliputi kegiatan penyusunan RTRW Kabupaten yang bersifat umum, baku dan minimal harus dipenuhi dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten.

Pedoman ini merupakan dasar penyusunan RTRW Kabupaten yang mencakup mulai dari persiapan penyusunan hingga proses legalisasi RTRW Kabupaten sebagai Peraturan Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 5 (lima) bab, yaitu:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Bab 2 Ketentuan Umum

Bab ini berisikan pengertian-pengertian dasar yang digunakan dalam buku pedoman ini, kedudukan RTRW Kabupaten dalam jenjang perencanaan, dan pengertian mengenai RTRW Kabupaten itu sendiri yang mencakup skala dan jangka waktu perencanaan, tujuan dan sasaran, fungsi, dan kedalaman substansinya.

Bab 3 Proses dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten

Bab ini menjelaskan proses penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan penjelasan mengenai kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan tersebut, dan proses legalisasi RTRW Kabupaten.

Bab 4 Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW Kabupaten

Bab ini menjabarkan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan RTRW Kabupaten disertai dengan data/peta yang dibutuhkan dalam analisis tersebut.

Bab 5 Substansi RTRW Kabupaten

Bab ini menjelaskan substansi dari RTRW Kabupaten sebagai produk atau keluaran proses penyusunan rencana.